



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis. 31 Agustus
Waktu	: 10.00 WIB – 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kemensos RI TA 2022; 2. Laporan Pelaksanaan Anggaran Kemensos RI TA 2023; 3. Pembahasan RKA K/L Kemensos RI TA 2024.
Ketua Rapat	: Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Agus Widijatmoko, S.H.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Sosial RI, Dr. (H.C) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T.; 3. Jajaran Kementerian Sosial RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi oleh Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI , Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A., dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda "Laporan Keuangan TA 2022, Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Pembahasan RKA Kementerian Sosial TA 2024" dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2022 yang terealisasi sebesar Rp96.534.361.336.825,- (*sembilan puluh enam triliun lima ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*) atau sebesar 98.58 persen dari Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI TA 2022 sebesar Rp97.928.061.416.000,- (*sembilan puluh tujuh triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

UKE I	PAGU ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	%
<u>Sekretariat Jenderal</u>	<u>676.288.233.000</u>	<u>633.702.697.484</u>	<u>93.70%</u>
<u>Inspektorat Jenderal</u>	<u>36.843.408.000</u>	<u>34.411.421.712</u>	<u>93.40%</u>
<u>Ditjen Rehsos</u>	<u>1.540.462.129.000</u>	<u>1.506.148.679.289</u>	<u>97.77%</u>
<u>Ditjen Linjamsos</u>	<u>30.994.480.362.000</u>	<u>30.779.877.533.945</u>	<u>99.31%</u>
<u>Ditjen Dayasos</u>	<u>64.679.987.284.000</u>	<u>63.580.221.004.395</u>	<u>98.30%</u>
TOTAL	97.928.061.416.000	96.534.361.336.825	98.58%

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2023 yang sampai tanggal 30 Agustus 2023 terealisasi sebesar Rp51.113.535.099.850,- (*lima puluh satu triliun seratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 64.36 persen dari Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI TA 2023 sebesar Rp79.419.425.895.000,- (*tujuh puluh sembilan triliun empat ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

UKE I	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	%
<u>Sekretariat Jenderal</u>	<u>724.495.903.000</u>	<u>356.782.126.551</u>	<u>49.25%</u>
<u>Inspektorat Jenderal</u>	<u>47.026.464.000</u>	<u>21.081.195.812</u>	<u>44.83%</u>
<u>Ditjen Rehsos</u>	<u>2.454.771.239.000</u>	<u>815.320.235.052</u>	<u>33.21%</u>
<u>Ditjen Linjamsos</u>	<u>30.594.941.532.000</u>	<u>20.047.885.224.834</u>	<u>65.53%</u>
<u>Ditjen Dayasos</u>	<u>45.598.190.757.000</u>	<u>29.872.466.317.601</u>	<u>65.51%</u>
TOTAL	79.419.425.895.000	51.113.535.099.850	64.36%

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2024 sebesar Rp79.198.826.945.000,- (*tujuh puluh sembilan triliun seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) atau meningkat dibanding Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun 2024 sebesar Rp77.828.866.946.000,- (*tujuh puluh tujuh triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

UKE I	PAGU INDIKATIF 2024	PAGU ANGGARAN 2024
Sekretariat Jenderal	671.160.457.000	674.494.557.000
Inspektorat Jenderal	44.408.329.000	44.408.329.000
Ditjen Rehsos	1.259.431.621.000	2.489.703.297.000
Ditjen Linjamsos	30.374.089.148.000	30.510.393.371.000
Ditjen Dayasos	45.479.777.391.000	45.479.827.391.000
TOTAL	77.828.866.946.000	79.198.826.945.000

4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- Mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI tahun 2022 dan prestasi ini harus terus dipertahankan.
 - Mendorong Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan sukses salur bantuan sosial yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - Mendorong Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.
 - Memperhatikan nasib, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan anak-anak yatim piatu.
 - Memperbaiki distribusi dan kesejahteraan tenaga pendamping PKH sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing.
 - Terus memperbaiki proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.

5. Dengan memperhatikan pandangan dan usulan sebagaimana point 4, Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI TA 2024 sebagai berikut:

No	Usulan	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya salur		
	a. PKH/Sembako/BPNT	Rp832.040.000.000	
	b. YAPI	Rp15.581.691.945	
	c. Lanjut usia	Rp232.500.000	
	d. Disabilitas	Rp147.963.000	
2.	RST	Rp182.000.000.000	9.100 rumah
3.	Tambahan honor pendamping PKH	Rp350.000.000.000	3 bulan
4.	PENA	Rp120.000.000.000	20.000 KPM
5.	Asuransi Kesehatan Pendamping Sosial (PKH, TKSK, TAGANA, Pendamping Rehsos dan Pordam)	Rp13.440.000.000	70.000 pendamping sosial
6.	YAPI (Data Kemensos LKS non-PKH)	Rp454.506.000.000	378.755 orang x 6 bulan
7.	Permakanan		
	a. Lansia	Rp552.000.000.000	Rp30.000 x 184 hari x 100.000 PM
	b. Disabilitas	Rp186.432.480.000	Rp30.000 x 184 hari x 33.774 PM
	c. Biaya pengiriman	Rp49.228.832.000	
	Total	Rp2.755.609.466.945	

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si